

Polisi Sita Puluhan Komputer dan HP Karyawan Pinjol Ilegal

JAKARTA (IM) - Sebanyak 56 orang karyawan pinjaman online (pinjol) ilegal dididik polisi dari salah satu ruko yang dijadikan kantor usaha ilegal tersebut di kawasan Jakarta Barat. Selain itu, Polisi juga menyita 52 unit perangkat komputer dan 56 unit telepon seluler milik karyawan.

"Beberapa barang bukti dan puluhan karyawan sudah kami amankan di kantor sindikat pinjol," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi, Kamis (14/10). Hengki mengatakan, penggerebekan ruko itu berawal dari laporan masyarakat.

"Masyarakat yang resah

akibat pinjol ini melapor ke kami dan kami kami lakukan penyelidikan," ucap Hengki.

Dari hasil penyelidikan di Otoritas Jasa Keuangan, ternyata pinjol tersebut tidak terdaftar alias ilegal. Polisi pun langsung turun tangan melakukan penggerebekan pada Rabu (13/10) kemarin.

Polres Metro Jakarta Pusat masih terus mengembangkan kasus ini guna mengetahui siapa pemilik sindikat pinjol itu.

"Sampai saat ini kami masih mengembangkan kasus tersebut, nanti jika sudah selesai pemeriksaan semua kami sampaikan lagi," tutur Hengki. ● han

Partai Buruh Serahkan 2 Dokumen Terkait Mahkamah ke Kemenkumham

JAKARTA (IM) - Seumilah pengurus Partai Buruh menyerahkan dua buah dokumen terkait partai tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (14/10).

"Hari ini ada dua dokumen, tadi yang pertama perubahan kepengurusan Mahkamah Partai, yang kedua (surat) Mahkamah Partai menyatakan tidak ada sengketa di internal Partai Buruh," kata Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi di kantor Kemenkumham, Kamis (14/10).

Agus menjelaskan, partainya menyertakan dua dokumen itu terlebih dahulu sebelum menyerahkan dokumen susunan kepengurusan Partai Buruh dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh.

Menurut rencana, kata Agus, dokumen susunan kepengurusan dan AD/ART Partai Buruh akan diserahkan ke Kemenkumham selambat-lambatnya pada pekan depan. Agus menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu akta notaris terkait perubahan susunan pengurus hasil kongres Partai Buruh pada 4-5 Oktober 2021 lalu.

"Nanti perubahan kepengurusannya itu akan kita sampaikan dalam waktu dekat ini, maksimal minggu depan kita sudah lakukan pengiriman perubahan kepengurusan ke Dirjen AHU," ujar Agus.

Ia pun menegaskan, Partai Buruh merupakan partai yang telah berbadan hukum karena partai ini sudah pernah mengikuti pemilihan umum pada 2004 dan 2009 lalu.

"Jadi kita ini hanya tinggal menyampaikan perubahan kepengurusan-kepengurusan Partai Buruh di hasil kongres kemarin di tanggal 4 dan tanggal 5," kata Agus.

Diketahui, sejumlah organisasi buruh kembali membangkitkan Partai Buruh melalui kongres di Jakarta, Senin (5/10). Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) terpilih menjadi Presiden Partai Buruh periode 2021-2026.

Iqbal sebelumnya menjelaskan, satu alasannya mendirikan Partai Buruh adalah terkait kekalahan perjuangan buruh dalam pembahasan dan penolakan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. "Alasan PB dihidupkan kembali, kekalahan telak kelas pekerja buruh tani, nelayan, guru, dan orang-orang kecil lain (terkait) omnibus law. Omnibus law lah, UU Cipta Kerja yang men-trigger Partai Buruh dihidupkan kembali," kata Iqbal dalam konferensi pers, Senin (5/10).

Ia mengatakan, Partai Buruh ingin memperjuangkan aspirasi para buruh dalam parlemen. Sehingga, perjuangan para buruh tidak lagi hanya dilakukan di jalanan melalui aksi demonstrasi. ● han

Ini Saran dari UNICEF dan WHO Terkait Penggunaan Masker pada Anak

JAKARTA (IM) - Penggunaan masker merupakan salah satu protokol kesehatan (prokes) dalam rangka mencegah penularan virus corona. Agar berfungsi dengan baik, penggunaan masker harus dilakukan dengan benar sesuai kebutuhan masing-masing orang.

Mengutip situs resmi Satgas Covid-19 Indonesia, saat ini penggunaan masker yang disarankan adalah dua lapis. Lapis pertama adalah masker medis dan lapis kedua merupakan masker kain. Tujuannya untuk mencegah droplet atau percikan yang keluar dan masuk dari dan ke saluran pernapasan.

Bagi orang dewasa, tentu hal yang mudah untuk menggunakan masker. Namun, bagaimana dengan anak-anak?

"Masker tidak perlu digunakan oleh siapa pun yang tidak bisa melepas masker tanpa bantuan, termasuk di antara mereka adalah bayi dan balita, atau seseorang dengan kesulitan bernapas," demikian pernyataan dilansir dari laman resmi UNICEF.

Meski begitu, Dana Anak Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (UNICEF) dan Organisasi mempunyai rekomendasi untuk pemakaian masker pada anak. Berikut tiga rekomendasinya. Anak berusia lima tahun ke bawah tidak perlu diwajibkan mengenakan masker. Anjuran ini dibuat demi keselamatan anak dan fakta bahwa setiap anak boleh jadi mencapai tahap perkembangan pada usia yang berbeda-beda.

Sedangkan anak usia enam hingga 11 tahun mengenakan masker berdasarkan tingkat risiko. Faktor risiko termasuk penularan lokal, kemampuan anak untuk mematuhi aturan, kehadiran orang dewasa, dan

pertimbangan lain seperti kondisi disabilitas atau penyakit bawaan.

Anak usia 11 tahun ke atas dapat diminta mengikuti aturan mengenakan masker yang sama dengan yang berlaku untuk orang dewasa.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 sekaligus Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro mengatakan, penggunaan masker berlaku untuk semua level selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Prinsip universal dari bermasker juga tetap berlaku di level berapa pun, karena masker ku melindungi mu, masker mu melindungi ku," kata Reisa melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP, Rabu (22/9) lalu.

Reisa juga mengatakan, meski anak-anak sudah diperbolehkan mengakses ruang-ruang publik, protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak aman tetap harus diterapkan. Ia meminta orangtua memberikan informasi yang lengkap kepada anak bahwa Covid-19 kemungkinan masih akan tetap ada. "Maka pesan utamanya ialah membiasakan masker dan cuci tangan serta prokes lainnya sebagai cara melindungi diri dan orang lain semenjak usia dini," ujarnya.

Lebih lanjut, Reisa meminta masyarakat konsisten untuk bekerja sama dalam mempertahankan penurunan kasus Covid-19 agar penularan virus Corona semakin bisa ditekan. "Dan makin banyak prestasi dan kabar gembira yang kita nikmati ke depan, karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab," ucapnya. ● mar

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PANGKOARMADA I RESMIKAN GALERI GHORA WIRA

Panglima Koarmada I Laksda TNI Arsyad Abdullah (kedua kanan) meninjau galeri Ghora Wira Koarmada I saat peresmian di Mako Koarmada I, Jakarta, Kamis (14/10). Galeri Ghora Wira didirikan agar publik bisa lebih mengenal tentang sejarah TNI AL secara umum dan peran Koarmada I secara khusus dalam hal sejarah pertahanan nasional.

Haruskah Anies Masuk Parpol jika Ingin Jadi Capres pada 2024?

Masa Tugas Anies Baswedan di DKI Jakarta berakhir Oktober 2022. Pilpres dan Pilkada DKI baru digelar 2024. dalam 2 tahun kosong itu, Anies harus bisa jaga popularitasnya kalau mau nyapres di 2024.

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai perlu merencanakan langkah politik jika ingin maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu perlu berjuang karena bakal kehilangan panggung politik selama dua tahun sebelum Pilpres 2024.

Pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa DKI Jakarta akan menggelar pilkada lagi pada 2024. Sedangkan masa bakti Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya sampai

Oktober 2022. Analisis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan, Anies harus pandai menjaga popularitas dan elektabilitasnya selama dua tahun tanpa panggung politik, jika ingin tetap maju sebagai capres 2024. Misalnya, dengan memperbanyak kegiatan sosial. Namun, selain itu, ia juga harus memastikan dukungan partai politik mengalir untuk dirinya.

"Di tengah rezim partai, tidak ada artinya popularitas dan elektabilitas kalau tidak ada

partai yang dukung," ujar Adi. Syarat itu bisa saja maju sebagai capres atau cawapres, seseorang harus diusung oleh partai atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi 20 persen di parlemen.

"Pilihan pahitnya, Anies masuk ke partai politik," katanya.

Masih Gelap

Anies Baswedan membutuhkan dukungan partai politik jika ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sementara hingga kini masih belum jelas dukungan parpol untuk Anies jika maju Pilpres 2024. "Suka tidak suka, negara ini rezim partai politik," kata Adi.

"Untuk menjadi seorang kandidat capres, terlebih dulu harus bisa menggenapi ambang batas presiden (presidential threshold) 20 persen dukungan dari partai atau

gabungan partai politik," jelasnya.

Presidential threshold 20 persen ini merupakan syarat untuk mencalonkan presiden di Indonesia. Artinya, calon presiden-wakil presiden hanya bisa diusung oleh partai politik dengan 20 persen kursi di parlemen.

Jika kursi yang dimiliki partai politik tak mencapai 20 persen, maka partai politik tersebut mesti berkoalisi dengan partai lain hingga jumlah kursinya mencukupi, baru dapat mengusung pasangan capres-cawapres. Elektabilitas dan popularitas Anies yang cukup unggul saat ini dinilai bukan jaminan ia akan dengan mudah menggaet dukungan partai politik.

Terlebih, saat ini masing-masing partai politik mulai mengapungkan nama elitnya sebagai kandidat calon presiden. Sebut saja Gerindra yang akan mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai capres untuk kali keempat. Golkar yang menjagokan Airlangga Hartarto atau PDI-P dengan Puan Maharani.

"Sejauh ini Anies kan agak sepi dukungan politik dari partai. Paling mungkin hanya PKS, yang sedang mengetes pasar. Tapi, kan PKS juga mau Ketua Majelis Syura mereka, Salim Segaf Aljufri, maju," lanjut Adi.

"Makanya saya sebut pencapresan Anies 2024 gelap gulita, kecenderungan parpol ini mengusung kader mereka untuk pilpres," ujarnya. ● han

Kepatuhan Warga terhadap Prokes Menurun Saat Berada di Restoran

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Gerakan Pakai Masker (GPM) Kemal Gani mengatakan, kepatuhan masyarakat menggunakan masker saat berada di tempat makan atau restoran menurun. Selain melepas masker, para pengunjung pun tak menjaga jarak.

"Semua yang ada di dalam mal memakai masker, nah begitu kita masuk ke restoran, kita akan melihat fakta banyak orang yang duduk berdekatan, ngobrol-ngobrol tidak pakai masker," kata Kemal dalam diskusi secara virtual bertajuk "Hidup Baru Patuh Prokes", Kamis (14/10).

Seperti diketahui, selain wajib memakai masker, seseorang yang berada di luar rumah juga harus tetap menjaga jarak, terutama saat berada di tempat umum yang berpotensi terjadi kerumunan. Jadi seharusnya saat berada di restoran atau tempat makan, pengunjung jangan sampai melepas masker dan tetap menjaga jarak dengan pengunjung lainnya. Hal ini penting agar tidak tertular virus Corona.

Kemal menyarankan, sebaiknya pengunjung tidak berbincang saat berada di restoran.

"Jadi pas makan harus diam, tidak ngobrol, dan posisi duduk harus dengan jarak tertentu harus dijaga," ujarnya.

Perlu diketahui bahwa memakai masker dengan benar dapat memberikan perlindungan 80 persen dari penularan virus corona. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan tak lalai menggunakan masker.

"Sejak tahun lalu, kami gencar melakukan sosialisasi untuk masyarakat berdisip-

lin memakai masker. Kami lakukan di pesantren, di pasar rakyat, komunitas, dan sebagainya," ujar Kemal.

Waspada Akhir Tahun

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, dr. Alexander K. Ginting mewanti-wanti agar semua pihak tetap waspada terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19, seperti di dalam negara tetangga Singapura dan Malaysia.

"Kita lihat negara tetangga, negara tetangga kita sudah infrastrukturnya, vaksinasinya sudah bagus masih terjadi lonjakan, rumah sakit yang penuh. Ini jangan kita ulangi," ujar Alex dalam dialog secara virtual, Selasa (12/10).

Karena itu, Alex pun menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan terus diberlakukan sampai dengan status pandemi Covid-19 telah dicabut oleh World Health Organization (WHO).

Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, dan yang penting adalah protokol kesehatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Memang, dari berbagai laporan dari Kementerian Kesehatan, juga dari Satgas Covid-19 nasional dan juga dari data provinsi di Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali bahwa angka kasus positif sudah sangat jauh menurun.

Demikian juga angka Bed Occupancy Ratio (BOR) di Rumah Sakit juga sudah sampai dibawah 10%. Bukan berarti penerapan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dalam kehidupan sehari-hari dapat diken-

dorkan.

Bahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito juga mengingatkan agar seluruh pihak mewaspada potensi gelombang ketiga penularan Covid-19 di Indonesia, yang diprediksi bisa terjadi pada akhir tahun.

"Ancaman gelombang ketiga yang diprediksi oleh para ahli akan terjadi di bulan Desember," kata Ganip saat meninjau Posko Relawan Sulut Hebat Kompak Lawan Covid-19 di Kota Manado, Sulawesi Utara, dikutip dari siaran pers, Minggu (10/10).

Setidaknya pada bulan Desember ada dua momentum besar yang perlu diwaspadai, yakni Hari Natal dan Tahun Baru. Momentum tersebut sangat berpotensi memicu kenaikan kasus Covid-19 karena adanya keinginan masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan.

Kemudian perubahan cuaca pada periode tersebut juga dapat mempengaruhi daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit.

"Karena saat itu (Desember) juga ada pergantian cuaca. Ini yang menjadi suatu ancaman peningkatan Covid-19," katanya.

Namun potensi gelombang ketiga tersebut dapat dicegah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinas.

Kedua hal tersebut merupakan kunci pencegahan dan mitigasi penularan Covid-19, ditambah dengan pola tracing, testing, dan treatment (3T) dalam penanganannya. ● mar



IDN/ANTARA

PENUTUPAN POS PERBATASAN RI-PNG

Personel Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dari Yonif 131 Bukit Barisan berjalan di dekat pintu Pos Perbatasan RI-Papua Nugini (PNG), Skouw, Jayapura, Papua, Kamis (14/10). Sejak merebaknya pandemi COVID-19 pintu lintas batas kedua negara itu ditutup guna mengurangi penyebaran virus corona.

KPI Bantah Ancam Korban Pelecehan Seksual untuk Cabut Lapornya

JAKARTA (IM) -Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Kelembagaan, Irsal Ambia membantah adanya ancaman dari pihaknya kepada MS, korban dugaan pelecehan seksual dan perundungan untuk mencabut laporan di kepolisian.

Irsal menegaskan, KPI mendukung proses hukum yang saat ini berjalan di kepolisian.

"Posisi KPI jelas sejak awal mendorong ini diselesaikan oleh kepolisian," kata Irsal saat dihubungi wartawan, Kamis (14/10).

Irsal mengatakan, KPI tidak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan kasus tersebut di luar jalur hukum.

"Kita juga tidak berkepentingan untuk menyelesaikan kasus ini di luar jalur hukum karena sejak awal sudah ditangani kepolisian karena ada dugaan pidana," jelasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum dari MS, Muhammad Muallimin mengklaim kliennya kembali mendapat ancaman

agar mencabut laporan polisi dan mau berdamai dengan terduga pelaku.

Muallimin mengatakan, ancaman kali ini datang dari salah satu pejabat di KPI pusat. Pejabat itu secara halus menyampaikan bahwa MS bisa saja diberhentikan dari KPI jika tidak mau mencabut laporan.

"Ada sedikit nada ancaman halus kalau seandainya ingin tetap bekerja di KPI harus mau berdamai dengan pelaku dan tidak meneruskan ini ke proses hukum," kata Muallimin saat dihubungi, Rabu (13/10) kemarin.

Muallimin mengatakan, kliennya sempat khawatir dengan ancaman yang disampaikan oleh salah satu pejabat di KPI itu. Namun, MS pada akhirnya tetap teguh untuk melanjutkan proses hukum setelah mendapatkan dukungan dari tim kuasa hukumnya. Muallimin pun memastikan pihaknya akan mengawal MS agar tidak diberhentikan secara semena-mena dari KPI. ● mei

PENGUMUMAN PENGAMBILAN PT. CITYLINK EXPRESS INDO
Direksi PT. CITYLINK EXPRESS INDO ("Perseroan"), mengumumkan sehubungan dengan rencana jual beli saham yang dilakukan oleh para pemegang saham, maka akan dilakukan perubahan pemegang saham dan pengendalian Perseroan. Adapun pengambilan tersebut akan dilakukan secara efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Perseroan.
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan dilakukan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dan apabila ada tanggapan/ keberatan atas pengambilan saham tersebut dapat disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman ini disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Perseroan dengan alamat:
PT. CITYLINK EXPRESS INDO
Rukan City Boulevard Blok F10 & F11
Jl. Raya Kamal Tengah, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 2 dan 8 UU no. 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 15 Oktober 2021
PT. CITYLINK EXPRESS INDO
Ttd
Direksi

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ITE EXHIBITIONS INDONESIA ("Perseroan") No. 18, tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan MRS TANUHMARIA, S.H., Notaris di Jakarta dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2021, Perseroan telah dibubarkan.
Setiap pihak yang mempunyai piutang terhadap Perseroan dapat mengajukan tagihan dengan cara tertulis kepada saya sebagai liquidator Perseroan, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah sehubungan dengan tagihan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 15 Oktober 2021
Liquidator
Richard Yapsunto S.H., LL.M.
Armand Yapsunto Muharamyah & Partners
Generali Tower, Lantai Penthouse
Grand Ruzita Business Park,
Jl. H.R. Rusauna Said, Jakarta 12940, Indonesia

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Keputusan Sirkuler") PT. MD CEMERLANG OPTIMA RAYA PERSADA, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), telah memutuskan:
-Menyetujui Penurunan Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan Perseroan;
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam hal terlapat keberatan dari kreditur Perseroan terhadap Penurunan Modal, keberatan tersebut agar disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Perseroan dengan alamat sebagaimana tertera di bawah ini dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.
Jakarta, 15 Oktober 2021
PT. MD CEMERLANG OPTIMA RAYA PERSADA
MD Place Tower I
Jl. Setiabudi Selatan No.7 Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

KEHILANGAN
Telah Hilang Sertipikat Hak Milik No.09826/Lenteng Agung, An Haresh Kumar Manwani (Haresh Kumar). Letak Tanah Jalan Lenteng Agung Raya Rt/Rw 005/01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, luas tanah 171 m2

KEHILANGAN
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kelas C Sementara Berjangka No. 29/C.37/C.31.74.09/1.785.51/2019, An Haresh Kumar. Letak Tanah Jalan Lenteng Agung Raya Rt/Rw 005/01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, luas tanah 171 m2

PENGUMUMAN RUPS LB PEMBUBARAN PT GENESIS NETWORKS (dalam likuidasi)
Berdasarkan Keputusan RUPS LB PT GENESIS NETWORKS (dalam likuidasi) ("Perseroan") tanggal 01-10-2021, telah diambil keputusan untuk menegakkan kembali keputusan RUPS LB tanggal 08-12-2020 yaitu membubarkan Perseroan sejak tanggal 08-12-2020, dan mengangkat Ervina Cahyadi sebagai Likuidator
Ervina Cahyadi (Likuidator)
SOHO CAPITAL @Podomoro City Lt. 16 Suite SC-1606A, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470